

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Industri Jasa Konstruksi Di Indonesia

Industri jasa konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi, termasuk tenaga profesi, pelaksana konstruksi dan juga para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industry (Hillebrandt,1985). Jasa konstruksi adalah jasa yang menghasilkan prasarana dan sarana fisik. Jasa tersebut meliputi kegiatan studi, penyusunan rencana teknis/rancang bangun, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharannya. Prasarana dan sarana fisik merupakan landasan pertumbuhan sektor-sektor dalam pembangunan nasional, termasuk di sektor pertambangan, serta jasa konstruksi berperan pula sebagai penyedia lapangan kerja, maka jasa konstruksi penting dalam pembangunan nasional (Suraji, 2003). Sebelum terjadi krisis moneter, sektor jasa konstruksi mengalami pertumbuhan yang cukup fantastik sehingga merupakan salah satu motor penggerak sektor perekonomian yang utama.

2.2 Kualifikasi Jasa Konstruksi

Adapun kualifikasi Badan Usaha Jasa Golongan Besar menurut Peraturan Lembaga LPJK No 11a Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

2.2.1 Golongan Besar I :

1. Kekayaan bersih :Lebih dari Rp 10 milyar sampai dengan Rp 50 milyar

2. Pengalaman :

- a. Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2) dan wajib memiliki PJB, PJT dan PJK secara terpisah
 - b. Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2) dan untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT).
3. PJT : 1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya
 4. PJB : Wajib memiliki PJB yang terpisah dari PJT dan PJK
 5. Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan : 0 sampai dengan Rp 250 Milyar
 6. Batasan Nilai Satu Pekerjaan : Maksimum Rp 250 Milyar
 7. Jumlah Paket : 6 atau $1.2 \times N$
 8. Maksimum jumlah subklasifikasi dan klasifikasi : Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda.

2.2.2 Golongan Besar II :

1. Kekayaan bersih : Lebih dari Rp 50 milyar sampai dengan tak terbatas
2. Pengalaman :
 - a. untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah

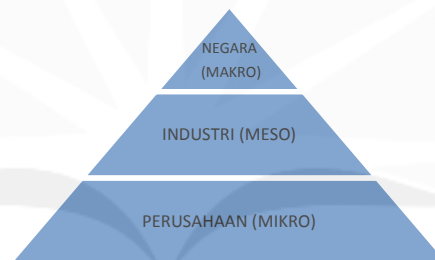
Rp83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1); dan Wajib memiliki PJB, PJT dan PJK secara terpisah

- b. Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar1 (B1) dan Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT).
3. PJT : 1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat Madya
4. PJB : Wajib memiliki PJB yang terpisah dari PJT dan PJK
5. Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan : 0 sampai dengan tak terbatas
6. Batasan Nilai Satu Pekerjaan : Tak Terbatas
7. Jumlah Paket : 6 atau $1.2 \times N$
8. Maksimum jumlah subklasifikasi dan klasifikasi : Tak Terbatas

2.3 Daya Saing (*Competitiveness*)

Istilah daya saing berasal dari kata daya yang bermakna kekuatan, dan kata saing yang berarti mencapai lebih dari yang lain, atau beda dengan yang lain dari segi mutu, atau memiliki keunggulan tertentu. Artinya daya saing dapat bermakna kekuatan untuk berusaha menjadi unggul dalam hal tertentu yang dilakukan oleh kelompok atau institusi tertentu. Konsep daya saing mengacu pada kemampuan untuk mencapai dominasi dan kemantapan dalam kompetisi antara perusahaan individual dan pesaing ditingkat mikro (perusahaan) dan antara ekonomi pada

tingkat ekonomi makro (Markus, 2008). Daya saing (*competitiveness*) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkat hirarki yaitu negara (makro), sektor industri (meso) dan perusahaan (mikro) (Momaya dan Selbi, 1998). Daya saing negara didefinisikan sebagai suatu lingkungan nasional yang dapat membangun bisnis. Daya saing sektor didefinisikan sebagai sektor bisnis yang menawarkan potensi untuk tumbuh dan ROI (*return on investment*) yang menarik. Konsep ini bisa didefinisikan sebagai kemampuan kolektif perusahaan untuk bersaing secara internasional. Daya saing perusahaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendesain, memproduksi, dan memasarkan produk yang lebih superior dibanding pesaingnya, dengan mempertimbangkan harga dan kualitas.



Gambar 2.1. Hirarki Daya Saing

(Sumber : Momaya & Selbi, 1998)

Menurut Kadin (2002), kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencapai industri jasa konstruksi yang kuat dan tangguh yaitu :

1. Tersedianya tenaga manajemen maupun tenaga ahli yang profesional dalam jumlah yang cukup.
2. Bahan baku/material yang distandardisasi secara nasional dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan.
3. Peralatan konstruksi harus diperoleh dengan mudah dan kompetitif.

4. Sistem informasi industri jasa konstruksi yang tepat dan terbuka mulai dari konsepsi proyek sampai saat-saat pelelangan.
5. Pengenalan terhadap metode-metode konstruksi yang mutakhir dan efisien sehingga dapat unggul dalam pelelangan internasional.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mengalami beberapa permasalahan yang sering terjadi pada industri jasa konstruksi yang mengakibatkan rendahnya daya saing, yaitu :

1. Buruknya sikap mental dan perilaku oknum. Menurut Pranoto (2005), yang menjadi penyebab berbagai permasalahan di sektor konstruksi dan investasi di Indonesia adalah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, monopoli dan praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang merupakan akibat dari bobroknya moral dan sikap mental (*attitude*) dan buruknya perilaku oknum.
2. Kurangnya daya saing dengan kontraktor asing akibat keterbatasan dana dan teknologi. Menurut penjelasan Sutjipto (1991), fasilitas jaminan bank kontraktor Indonesia masih sering ditolak oleh pemilik proyek di luar negeri yang menyebabkan kontraktor nasional masih sangat kesulitan untuk bersaing dengan kontraktor asing yang mampu memperoleh finansial dengan bunga rendah di negaranya. Selain itu, akibat keterbatasan kemampuan pemerintah maupun swasta untuk membiayai pembangunan proyek-proyeknya dengan anggaran dalam negeri, maka menyebabkan hampir semua proyek-proyek besar milik pemerintah maupun swasta dibiayai oleh dana pinjaman luar negeri. Dengan menggunakan alasan bahwa kontraktor nasional belum berpengalaman dan berkemampuan dalam teknologinya, investor asing

cenderung membawa kontraktor dari negaranya. Akibatnya, secara otomatis kontraktor-kontraktor asing masuk bersama dengan datangnya pinjaman luar negeri tersebut.

3. Kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya peran jasa konstruksi bagi kepentingannya masih perlu ditumbuh kembangkan (Trisnowardono,2002).

2.4. Indikator Yang Mengungguli Daya Saing Perusahaan JasaKonstruksi

Berdasarkan penelitian Langford dan Male (2001), dijelaskan beberapa indikator kunci daya saing perusahaan jasa konstruksi sebagai berikut :

1. Corporate Image

- a. Organization's credibility
- b. Qualification of the company
- c. Project performance record

2. Technology and innovation

- a. Technology know-how
- b. Technology advancement
- c. Investment on R&D
- d. Conversant with local practice

3. Marketing capability

- a. Market coverage
- b. Procurement ability
- c. Ability to forecast market changes

d. Relationship with clients and consultants

4. **Financial capability**

a. Financial status

b. Credibility grade

c. Payment to subcontractors or suppliers

d. Loan repayment

5. **Project management skill**

a. Site progress management

b. Quality control

c. Coordination with subcontractors

d. Contract and risk management

e. Environmental and safety management

f. Knowledge about local construction law

6. **Organization & Human resource**

a. Organizational structure & culture

b. Quality of personnel

c. Effectiveness of training program

d. Effectiveness of internal cooperation